



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIDHI WIDAYAT**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN**
3. NHK : **210244**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.925.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/128 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/21 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/21 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 153 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/180 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 750.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/150 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/120 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m²/36 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 709.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, MAZDA MAZDA2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000



3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.417.386
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.694.417.386
III. HUTANG	Rp.	80.608.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.613.809.386

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.